

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka menjelaskan mengenai landasan teori, kemudian beberapa penelitian terdahulu, selanjutnya mengemukakan kerangka pemikiran dari peneliti, serta menjelaskan hipotesis penelitian

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.1.1.1. Definisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit usaha yang timbul akibat adanya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah tertentu. Perhitungan angka-angka PDRB dapat menggunakan tiga pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

3. Pendapatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir dalam jangka waktu tertentu, yang dirinci sebagai berikut :

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba;
- b. Konsumsi pemerintah;
- c. Perubahan stok;
- d. Ekspor neto;

Perhitungan PDRB dibagi atas dua yaitu PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah-daerah tersebut. Angka ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah serta menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun yang bersangkutan. Angka ini digunakan untuk menganalisis pola atau struktur ekonomi wilayah tersebut.

Pertumbuhan PDRB dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi karena PDRB adalah jumlah

nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. PDRB dihitung atas dasar konsep aliran (*flow concept*) yang berarti perhitungannya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Kegunaan dari konsep ini yakni membandingkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya. PDRB perhitungannya hanya terbatas pada wilayah domestik saja. Hal tersebut memacu untuk mengukur sejauh mana kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah dapat mendorong aktivitas perekonomian domestik atau wilayah.

2.1.2. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan prasarana publik paling utama dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu negara, dalam kamus besar bahasa Indonesia infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi. Lebih jauh lagi, dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari *public capital* (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah.

Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem social dan system ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan banyak dampak terhadap sistem social dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat.

The World Bank (1994) membagi infrastruktur menjadi tiga, yaitu :

1. Infrastruktur ekonomi, adalah infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi *public utilities* (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, dan gas), *public work* (jalan, bendungan, kanal, irigasi, dan drainase), dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang, dan sebagainya).
2. Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, dan rekreasi.
3. Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, *control* administrasi dan koordinasi.

Infrastruktur terbagi atas sarana dan prasarana. Prasarana merupakan segala sesuatu yang menunjang terselenggaranya suatu proses yang berupa usaha, pembangunan maupun proyek. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, dengan kata lain sarana lebih ditunjukkan untuk benda-benda atau peralatan yang bergerak.

Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan untuk memfasilitasi tujuan-tujuan social dan ekonomi (American Pubic Works Association, Stone, 1974 dalam Kodoatie, R.J.,2005).

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur, menjelaskan beberapa jenis infrastruktur yang penyediaannya diatur oleh pemerintah, yaitu : infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, dan infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi. Penggolongan infrastruktur tersebut dikategorikan sebagai infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) dan infrastruktur perlengkapan (*complementary infrastructure*). Infrastruktur dasar meliputi sektor-sektor yang mempunyai karakteristik publik dan kepentingan yang mendasar untuk perekonomian lainnya, tidak dapat diperjualbelikan (*non tradable*) dan tidak dapat dipisahkan baik secara fisik maupun spasial, contohnya jalan raya, rel kereta api, pelabuhan laut, drainase, bendungan, dan lain sebagainya. Sedangkan infrastruktur pelengkap, misalnya gas, listrik, telepon, dan pengadaan air minum. Namun, untuk infrastruktur dasar dikelola dan dilakukan oleh pemerintah karena sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas.

2.1.2.1. Infrastruktur Jalan

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan tercapainya konektivitas antar wilayah, pemerintah telah menetapkan pembangunan infrastruktur jalan. Karena infrastruktur jalan sangat berpengaruh pada kegiatan distribusi dan logistik yang merupakan urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial-budaya dan pertahanan keamanan

nasional, serta penghubung antar daerah sebagaimana kondisi geografis di Indonesia.

Selain itu, infrastruktur jalan dapat menopang sektor transportasi yang dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa, mobilisasi manusia, aksesibilitas antar wilayah, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.

Studi menunjukkan, jika hendak memakmurkan rakyat dan menaikkan pertumbuhan ekonomi, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki jalur distribusi, dan jalur distribusi utama adalah jalan. Karena itu kualitas jalan adalah kualitas perekonomian bangsa.

Tabel 2.1

Klasifikasi Jalan menurut Kondisi

Kondisi Jalan	Kriteria Jalan
Baik	Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan 60 km per jam dan selama 2 tahun mendatang tanpa pemeliharaan pada pengerasan jalan.
Sedang	Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan 40-60 km per jam dan selama 1 tahun mendatang tanpa rehabilitasi pada pengerasan jalan.
Rusak	Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan 20-40 km per jam dan perlu perbaikan jalan.
Rusak Berat	Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan tidak lebih dari 20 km per jam dan perlu perbaikan pondasi jalan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu

lintas, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur baru di Indonesia seperti MRT dan LRT termasuk kedalam proyek infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional (Prapti dkk., 2015). Salah satu wujud dari jenis klasifikasi ini yaitu infrastruktur transportasi yang sangat penting dalam meningkatkan kehidupan masyarakat. Disisi lain, biaya yang sangat besar yang dibutuhkan untuk pembangunannya seringkali menjadi perhatian besar bagi pemerintah. Oleh karena itu, menerapkan studi rekayasa nilai sebelum pembangunan infrastruktur dimulai akan mengatasi kekhawatiran tersebut (Chen dan Hsu, 2011).

2.1.2.2. Infrastruktur Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan oembangunan suatu Negara secara optimal. Melalui adanya pendidikan yang berkualitas dan bermutu maka akan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang cerdas dan memiliki pengetahuan maupun wawasan yang tinggi serta diharapkan mampu mengimplementasikannya dengan optimal sehingga dapat memberikan sumbangan terhadap kemajuan dan produktivitas ekonomi suatu daerah (Ernisusiyawati, 2013).

2.1.2.3. Infrastruktur Listrik

Infrastruktur ketenagalistrikan adalah segala hal yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan sarana pendukung lainnya. Dengan semakin majunya suatu wilayah, kebutuhan akan listrik menjadi tuntutan primer yang harus dipenuhi, tidak hanya untuk rumah tangga namun juga untuk kegiatan ekonomi terutama industri. Dalam kehidupan masyarakat yang semakin modern, semakin banyak peralatan rumah tangga, peralatan kantor serta aktivitas-aktivitas masyarakat yang mengandalkan sumber energi dan listrik (Krismanti, 2009).

2.1.2.4. Infrastruktur Kesehatan

Dalam suatu daerah dapat dikatakan sejahtera bila di daerah tersebut terdapat masyarakat yang mempunyai tingkat kesehatan yang terjamin. Tentunya untuk meningkatkan tingkat Kesehatan masyarakat itu sendiri membutuhkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pemerintah sudah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah bidang infrastruktur kesehatan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Infrastruktur yang memadai merupakan hal yang penting dalam perekonomian untuk mengefisiensikan proses produksi dan mobilisasi dalam perekonomian. Semakin meningkat hasil *output* per kapita maka

semakin tinggi pula produktivitas ekonomi dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tersebut. Maka dari itu, penyediaan infrastruktur yang memadai akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini akan diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengaruh Infrastruktur dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Langkat 2010-2019. Dwi Rayana Siregar, Ahmad Albar Tanjung (2020)	Infrastruktur Jalan dan Pertumbuhan Ekonomi	variabel bebas yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Lokasi penelitian di Kabupaten Langkat	Infrastruktur jalan yang baik tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan IPM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat.
2.	Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara. Andi Mardiana, Azhar J.Habu (2020)	Infrastruktur Jalan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi	lokasi penelitian dan alat analisis metode penelitian yang digunakan	Hasil analisis mengenai variabel infrastruktur jalan yakni nilai minimum sebesar 23,80%, yang menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup baik.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Infrastruktur, Investasi, dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Kasus pada provinsi di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa). Astariadi Kurniawan, Muhamad Ihsan (2021)	Infrastruktur Jalan, dan Pertumbuhan Ekonomi	metode penelitian yang digunakan dan jenis data yang digunakan berupa data panel.	Variabel investasi, tenaga kerja, dan infrastruktur jalan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
4.	Pengaruh Infrastruktur terhadap Produktivitas Ekonomi di Provinsi NTT. Elisabeth C. Gunita, Maria Yasintha Luruk, Nikson Tameno (2019)	Infrastruktur Jalan, infrastruktur listrik	lokasi penelitian dan variabel terikat yaitu produktivitas ekonomi	Hasil estimasi regresi menunjukkan nilai konstanta sebesar -12.07150 artinya jika nilai jalan(X1), listrik(X2), dan air (X3) adalah 0, maka nilai produktivitas ekonomi (Y) sebesar -12.07150.
5.	Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Sosial terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dendi Nur Saputra, Devi Valeriani, Christinaningrum (2021)	Infrastruktur listrik, infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi	lokasi penelitian dan metode penelitian yang digunakan.	Variabel listrik, air bersih dan kesehatan memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap PDRB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. Sri Kurniawati, Asyurrahman (2018)	Infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, infrastruktur kesehatan, dan Pertumbuhan Ekonomi	lokasi penelitian dan jenis data yang digunakan.	Adanya pengaruh signifikan pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi keberadaan infrastruktur jalan memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
7.	Pengaruh Infrastruktur Fisik terhadap Output Sektor Industri Pengolahan di Indonesia. Wulan Anggraini, Neni Widayaningsih, Istiqomah, Sodik Dwi Purnomo (2021)	Infrastruktur jalan, dan infrastruktur listrik,	skala penelitian dan jenis data yang dipakai	Infrastruktur jalan tidak berpengaruh terhadap output PDRB sektor industri pengoahan. Sedangkan infrastruktur air, listrik, dan teknologi da informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap sektor outut PDRB sektor industri pengolahan di Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode tahun 2005-2014. Ayudhita Rifaayani Supradi (2018)	Infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, dan Infrastruktur Pendidikan	Lokasi penelitian.	Variabel infrastruktur jalan berpengaruh negative dan signifikan. Sedangkan infrastruktur listrik dan air berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9.	Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial terhadap Petumbuhan Ekonomi Indonesia, 2015-2019. Divia Angelina, Krismanti Tri Wahyuni (2021)	Infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, dan Infrastruktur Kesehatan	lokasi penelitian dan metode analisis serta data yang digunakan.	Dengan metode estimasi SUR, semua variabel infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
10.	Analisis Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2008-2017). Dyah Amalia (2019)	Infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, infrastruktur pendidikan dan Infrastruktur Kesehatan	lokasi penelitian dan metode analisis serta data yang digunakan.	Variabel infrastruktur listrik, air, dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita Indonesia. Sedangkan infrastruktur jalan tidak berpengaruh terhadap PDRB per kapita Indonesia.

2.3. Kerangka Pemikiran

2.3.1. Hubungan antara Infrastruktur dengan Produk Domestik Regional Bruto

Dalam hubungan infrastruktur dengan produk domestik regional bruto, beberapa ekonom juga memberikan pendapatnya mengenai infrastruktur. Tanpa infrastruktur, kegiatan produksi pada berbagai sektor kegiatan ekonomi (industri) tidak dapat berfungsi. Todaro (2006) juga mendefinisikan infrastruktur sebagai salah satu faktor penting yang menentukan pembangunan ekonomi.

Literatur teori pertumbuhan ekonomi baru menjelaskan pentingnya pengaruh infrastruktur dalam mendorong perekonomian. Teori ini memasukan infrastruktur sebagai input dalam mempengaruhi output agregat. Penyediaan infrastruktur dapat menciptakan peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas produksi, misalnya ketersediaan dan reliabilitas ketersediaan air oleh jaringan irigasi. Ketimpangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah juga dapat disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi dan akses kepada sumber-sumber produksi. Ketersediaan jaringan jalan akan membuka dan menumbuhkan kegiatan ekonomi di daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi.

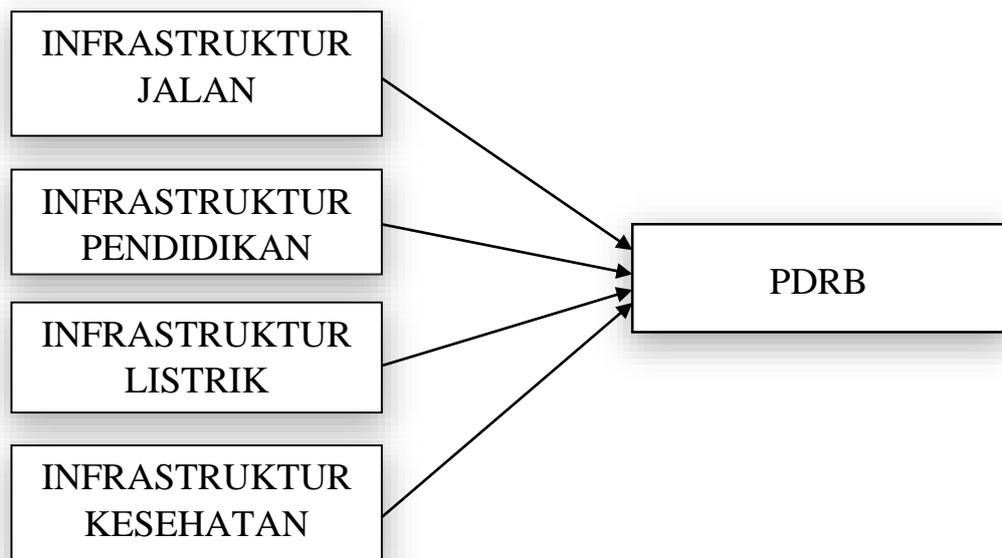
Hubungan antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi sudah lama menjadi bahan diskusi bagi para pengambil kebijakan. Bagi para pengambil kebijakan, pengembangan dan pembangunan prasarana sudah

tentu diharapkan akan menjadi *driving force* bagi pengembangan ekonomi. Sedangkan dalam ranah akademis, keterkaitan antara keduanya masih menjadi perdebatan.

Infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial merupakan masalah utama suatu wilayah jika di wilayah tersebut tidak mampu menjaga dan memeliharanya maka akan mengakibatkan perlambatan pertumbuhan dan tenaga kerja. Investasi dalam bidang prasarana infrastruktur adalah pilihan yang diminati dan mempunyai porsi besar terhadap total pengeluaran pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Jika suatu infrastruktur mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi maka potensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proses menghadapi era globalisasi yang saat ini sedang dihadapi tidak akan terlalu tertinggal dari negara-negara maju yang lainnya yang mana laju infrastrukturnya sudah lebih maju.

Tidak dapat dipungkiri infrastruktur jalan, pendidikan, listrik, dan kesehatan merupakan kunci tujuan pembangunan ekonomi. Hal ini didasari oleh banyaknya prasarana infrastruktur yang selalu bertambah. Bertambahnya infrastruktur ini berarti pertumbuhan ekonomi juga selalu bertambah. Jalan, pendidikan, listrik, dan kesehatan sangat berperan penting dalam proses produksi dan merupakan prakondisi yang sangat diperlukan untuk menarik akumulasi modal sektor swasta. Oleh karena itu, perekonomian harus selalu mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. Usaha

untuk menciptakan pemerataan ekonomi (*economic stability*) melalui redistribusi pendapatan (*income redistribution*) akan lebih mudah dicapai dalam periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan yang mungkin sebaiknya benar atau salah. Berdasarkan kerangka pemikiran dan identifikasi penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis atau dugaan sementara yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga Infrastruktur Jalan, Pendidikan, Listrik, dan Kesehatan secara parsial berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2021.

2. Diduga Infrastruktur Jalan, Pendidikan, Listrik, dan Kesehatan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat 2007-2021.

